

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan informasi yang diuraikan di dalam pembahasan dari hasil penelitian, dapat dibuat kesimpulan umum bahwa proses penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu masih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.

Namun berdasarkan hasil penelitian masih didapatkan beberapa hambatan yang berdampak pada kurang optimalnya pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam menyusun harga perkiraan sendiri (HPS). Adapun hambatan yang ditemui antara lain dari masing-masing aspek penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Aspek efisien Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu masih belum efisien dikarenakan DIPA/DPA tidak dilakukan pembaruan terkait harga satuan, tidak memanfaatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi

pekerjaan konstruksi dan fasilitas yang mendukung dalam proses kegiatan tersebut.

2. Aspek efektif Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sudah dilakukan dengan baik, namun masih kurang optimal dikarenakan fungsi dari pejabat pembuat komitmen (PPK) yang belum optimal dikarenakan kompetensi keilmuan konstruksi yang tidak dimiliki dan kurang mengikuti perkembangan terkait peraturan terbaru tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
3. Aspek akuntabel Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dari hasil penelitian masih ditemukannya dokumen-dokumen pendukung seperti brosur dan procelist barang serta surat permintaan harga yang tidak disertakan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Selain itu kinerja pejabat pembuat komitmen (PPK) yang kurang dapat dipertanggungjawabkan karena kepentingannya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari permasalahan yang ada pada Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan

Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Aspek efisien Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu penulis menyarankan agar pejabat pembuat komitmen (PPK) mengusulkan perubahan untuk biaya harga satuan pekerjaan minimal 6 (enam) bulan sekali untuk dilakukan perubahan pada DIPA/DPA. Mengusulkan permohonan untuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk ditetapkan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pekerjaan konstruksi dan usulan fasilitas operasional khusus pejabat pembuat komitmen (PPK).
2. Aspek efektif Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu penulis menyarankan agar pejabat pembuat komitmen (PPK) yang ditunjuk untuk menangani kegiatan pekerjaan konstruksi harus memiliki keilmuan sipil serta menganggarkan biaya tenaga ahli untuk mendampingi pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS), selanjutnya pejabat pembuat komitmen (PPK) harus selalu mengikuti perkembangan terkait pelaksanaan petunjuk teknis pengadaan barang/jasa terutama dalam menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan konstruksi.

3. Aspek akuntabel Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu penulis dapat menyarankan agar dokumen-dokumen pendukung pembentuk harga satuan dapat didokumentasikan dan diarsipkan sebagai kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang tidak merangkap dengan jabatan lainnya sehingga kinerjanya bisa maksimal dalam proses pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Agus, Sartono. (2011). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Daniel, Moehar. (2005). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dimiyati, Hamdan dan Nurjaman, Kadar. (2014). *Manajemen Proyek*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hadari, Nawawi. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasibuan, Malayu. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kamaluddin, Apiaty. (2017). *Administrasi Bisnis*. Makassar: CV. Sah Media
- Lupiyoadi, Hamdani. (2014). *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Marbun, Rocky. (2010). *Tanya Jawab Seputar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visi Media.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Miles dan Huberman. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudjisantosa. (2019). *Memahami Spesifikasi, HPS, dan Kerugian Negara*. Nusantara: Primaprint.
- Musthafa. (2017). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nafarin, M. (2015). *Penganggaran Perusahaan. Edisi Tiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Poerwanto. (2018). *New Business Administration*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Purhantara, Wahyu. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahayu, Sri dan Andry Arifian Rachman. (2013). *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rahman, M. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makasar: CV Sah Media.

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara.  
(2017). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Sarjana Terapan*. Jakarta : STIA-LAN Press

Siahaya, Willem. (2012). *Manajemen Pengadaan Procurement Management*. Bandung: Alfabeta.

Sulastri. Lilis. (2014). *Manajemen Sebuah Pengantar*. Bandung: La Goods Publishing.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutedi, Andrian. (2012). *Good Corporate Governance, Edisi I, Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wardiyanto, Bintoro. (2012). *Kebijakan E-Procurement*. Surabaya: Revka Petra Media.

## **B. JURNAL**

Rachmania, Syahna. (2020). Kesalahan Penyusunan HArga Perkiraan Sendiri (HPS) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Yang Berimplikasi Tindak Pidana. *Jurist-Diction*, 3 (3), 1123-1152. DOI: 10.20473/jd.v3i3.18641

I Gusti Agung Andryana Putera, Ida Bagus Putu Adriyana dan I Gede Bambang Wahyudi. (2019). Model Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Bali. *Jurnal Spektran*, 7 (2), 140-285. ISSN: 2302-2590.

### **C. SKRIPSI / TESIS / DISERTASI**

Adlina, Achadia Bella dan Dian Puji N. Simatupang. (2015). *Risiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Studi Terhadap Penyusunan Spesifikasi Teknis dan HARGA Perkiraan Sendiri (HPS) Yang Berpotensi Merugikan Keuangan Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### **D. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Politeknik STIA LAN JAKARTA
Lampiran 3	Surat Persetujuan Melakukan Penelitian dari Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Lampiran 4	Pedoman Penelaahan Dokumen
Lampiran 5	Hasil Telaah Dokumen
Lampiran 6	Pedoman Wawancara
Lampiran 7	Transkrip Wawancara Key Informant Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Lampiran 8	Transkrip Wawancara Key Informant Pejabat Fungsional Madya Pengelola Barang/Jasa
Lampiran 9	Transkrip Wawancara Key Informant Pejabat Fungsional Muda Pengelola Barang/Jasa
Lampiran 10	Transkrip Wawancara Key Informant Pejabat Fungsional Pratama Pengelola Barang/Jasa
Lampiran 11	Surat Pemberitahuan Telah Menyelesaikan Penelitian
Lampiran 12	Daftar Riwayat Hidup